

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kajian mengenai gerakan mahasiswa Abad Ke-XX tidak terlepas dari upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia. Gerakan mahasiswa tahun 1966 merupakan salah satu upaya demokratisasi pemerintahan Orde Lama yang setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam tempo 6 tahun menjadi pemerintahan yang otoriter. Setelah demokrasi terpimpin pemerintahan Orde Lama ditopang dua kekuatan, yakni militer dan politisi sipil campuran Nasakom yang oportunistik disisi lain. Meskipun tidak terlalu banyak diungkapkan dalam catatan sejarah, terlihat bahwa pada masa-masa antara 1959 hingga menjelang September 1965 telah muncul gerakan-gerakan kritis mahasiswa terhadap gejala otoritenisme yang dijalankan Soekarno dibalik penamaan Demokrasi Terpimpin.

Taher (1994: XXV) menjelaskan setelah Dekrit Presiden 1959 maka berakhirlah bentuk demokrasi partisipatif atau demokrasi representatif di negara ini, dan tentu saja sebagai konsekuensinya Indonesia mengalami sistem politik otoritarian, demokrasi hanya sebagai simbol retorika politik dikalangan elit nasional dalam rangka membentuk legitimasi sistem kekuasaan yang dibangun semenjak saat itu.

Demokrasi Terpimpin telah menarik berbagai pihak untuk bergelut dalam pemerintahan sehingga berakibat pada situasi politik yang tidak stabil. Tampilnya PKI dalam pemeritahan, memunculkan kecemburuan dan kekhawatiran banyak kalangan. Dalam situasi demikian, tampilnya kekuatan politik Angkatan Darat

tidak dapat dihindari. Akhirnya kekacauan politik memuncak dengan meletusnya G-30S 1965 yang telah mendorong runtuhnya pemerintahan Orde Lama.

Meletusnya G-30S 1965 ini menjadi titik balik dari pemerintahan Orde Lama. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai tahun 1955 mencapai puncaknya pada tahun 1965. Hal ini diperparah dengan dikeluarkannya Keppres No. 27 Desember 1965, tentang pengeluaran mata uang rupiah baru dengan perbandingan nilai Rp. 1,00 (satu rupiah) uang baru sama dengan Rp 1.000. (seribu) uang lama. Akhirnya rakyat mengalami kesengsaraan, mahasiswa pun mulai banyak mengalami kesulitan. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai pembayaran SPP dan ongkos transportasi yang melambung.

Dengan mengambil momentum dan untuk merealisasikan kritik atas pemerintahan Orde Lama. Mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa Indonesia membulatkan tekad untuk menuntut Tritura. Gerakan mahasiswa tahun 1966 dengan tuntutan Trituranya berhasil melakukan perubahan sistem pemerintahan kearah yang lebih demokratis dengan turunnya Ir. Soekarno dari kursi kepresidenan dan diganti oleh Soeharto sebagai pelaksana tanggung jawab presiden pada tahun 1966. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan penuh militer terhadap gerakan mahasiswa tahun 1966. Dimana mahasiswa dan militer terkhusus Angkatan Darat saling memanfaatkan satu sama lain. Militer memanfaatkan mahasiswa sebagai pionir perubahan sedangkan mahasiswa memanfaatkan angkatan darat sebagai back-up politik dan fisik.

Fatah (2000: 22) menjelaskan bahwa sistem pemerintahan demokratis yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia setelah Orde Baru berdiri

memang sempat dirasakan rakyat Indonesia. Dimana masa awal Orde Baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam perimbangan politik dalam Negara dan masyarakat. Tiga pusat kekuatan Orde Lama yaitu Presiden, Militer, dan PKI digeser oleh pusat-pusat kekuatan baru yaitu militer dan teknokrasi, serta kemudian birokrasi. Kekuatan kemasyarakatan yang selama Orde Lama terhambat aktualisasinya juga muncul kembali kepermukaan. Sekalipun militer menjadi pilar utama kekuasaan, namun kekuatan-kekuatan egaliter juga tumbuh saat itu. Dan kemudian dikenal sebagai terjadinya bulan madu antara Negara dengan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan Orde Baru. Masa ini amatlah memadai alasan tumbuhnya harapan demokratisasi.

Jika dilihat dari indikator Negara demokratis, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memang bisa dikatakan menjalankan satu indikator, dimana pemilihan umum berhasil diselenggarakan sebanyak 6 kali yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Walaupun pada kenyataannya hasil pemilu ini penuh dengan cacat. Kemudian prorotipe demokrasi itu segera mengabur ketiga bulan madu Negara-masyarakat juga mulai menghambur dan berakhir. Titik tolaknya adalah kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 dengan memperoleh suara mayoritas 62,8%. [Gerakan mahasiswa tahun 1971 merupakan gerakan mahasiswa pertama yang secara langsung mengkritik pemerintahan Orde Baru atas kinerja dan kebijakannya. Gerakan mahasiswa tahun 1971 ini berakhir dengan peristiwa malari pada tahun 1974.

Gerakan mahasiswa selanjutnya adalah gerakan mahasiswa tahun 1977. Gerakan ini merupakan bentuk perlawanan mahasiswa pada pemilu tahun 1977

dimana Soeharto mencalonkan kembali dirinya sebagai presiden Indonesia untuk priode selanjutnya. Di Jakarta mahasiswa melakukan aksi memprotes pelaksanaan Pemilu dalam upaya melindungi kepentingan rakyat untuk medapat keadilan. Mahasiswa memprotes peran tidak jujur dari kaum birokrasi sipil dan militer yang memihak kepada Golkar. Mahasiswa memprotes janji partai dalam kampanye yang amat indah bila dibandingkan dengan kemampuan partai melaksanakannya. Mahasiswa menolak berbagai kecurangan proses pemilu karena diartikan sebagai penipuan hak pemilih. Mahasiswa juga menolak kemenangan golkar yang dihasilkan oleh pemilu yang penuh cacat tersebut. Hal inilah yang menjadikan mahasiswa mengambil sikap Golput dalam pemilu 1977. Gerakan mahasiswa tahun 1977 ini merupakan gerakan mahasiswa anti Soeharto yang berujung dengan sejumlah persidangan mahasiswa.

Pecahnya bulan madu politik mahasiswa dengan Orde Baru belum berakhir. Tahun 1980 mahasiswa melakukan penolakan terhadap asas tunggal Pancasila. Diakhir tahun 1980 aktivis mahasiswa berhadapan dengan watak Orde Baru yang semakin totaliter dengan bentuk penangkapan, pengadilan, tuduhan “subversif”. Aktivis mahasiswa mendapat tuduhan menunggangi, mengotori, mendalangi. Hal ini dilakukan Orde Baru untuk menjauhkan mahasiswa dari politik praktis. Berbeda dengan gerakan mahasiswa sebelumnya gerakan mahasiswa tahun 1990-an tidak tergabung dalam lembaga atau organ formal. Pada priode ini mahasiswa mengorganisir aksi-aksi dalam jumlah massa yang besar tidak mewakili satu organ tertentu. Melainkan diartikan oleh isu yang mereka sepakati untuk diangkat, misalnya kasus tanah, aksi-aksi menentang SDSB, serta

isu-isu yang mengusung tema solidaritas terhadap korban repesifitas rezim Orde Baru.

Widdjojo (199: 105) menyatakan usaha mahasiswa dalam mengupayakan tercapainya pemerintahan yang demokratis menemui titik terang. Hal ini terlihat dari gerakan mahasiswa tahun 1990-an menjadi pergulatan politik langsung dan real dari pelaksanaan kata-kata (busa-busa dari meja diskusi). Isu-isu populis (advokasi persoalan tanah, kesenjangan sosial ekonomi) sampai struktural (tuntutan terhadap Soeharto diujung 1990) menandai lembaran perjalanan gerakan mahasiswa.

Paruh kedua tahun 1997 adalah awal dari bencana ekonomi Indonesia yang ditandai oleh melemahnya nilai rupiah. *International Monetary Fund* (IMF) mengumumkan paket bantuan keuangan senilai US\$ 23 milyar pada Oktober 1997, kemudian diikuti langkah pemerintah melikuidasi 16 bank pada 1 November 1997. Pada Desember 1997 hingga Januari 1998, krisis kian memburuk. Nilai rupiah sudah “terjun bebas” dari sekitar RP 4.000 ke Rp 11.000 per US\$1. RAPBN yang dibacakan Soeharto pada 6 Januari 1998 tidak menunjukkan kesungguhan rezim Orde Baru untuk melakukan reformasi ekonomi dan masih mengatakan bahwa “badai pasti berlalu”.

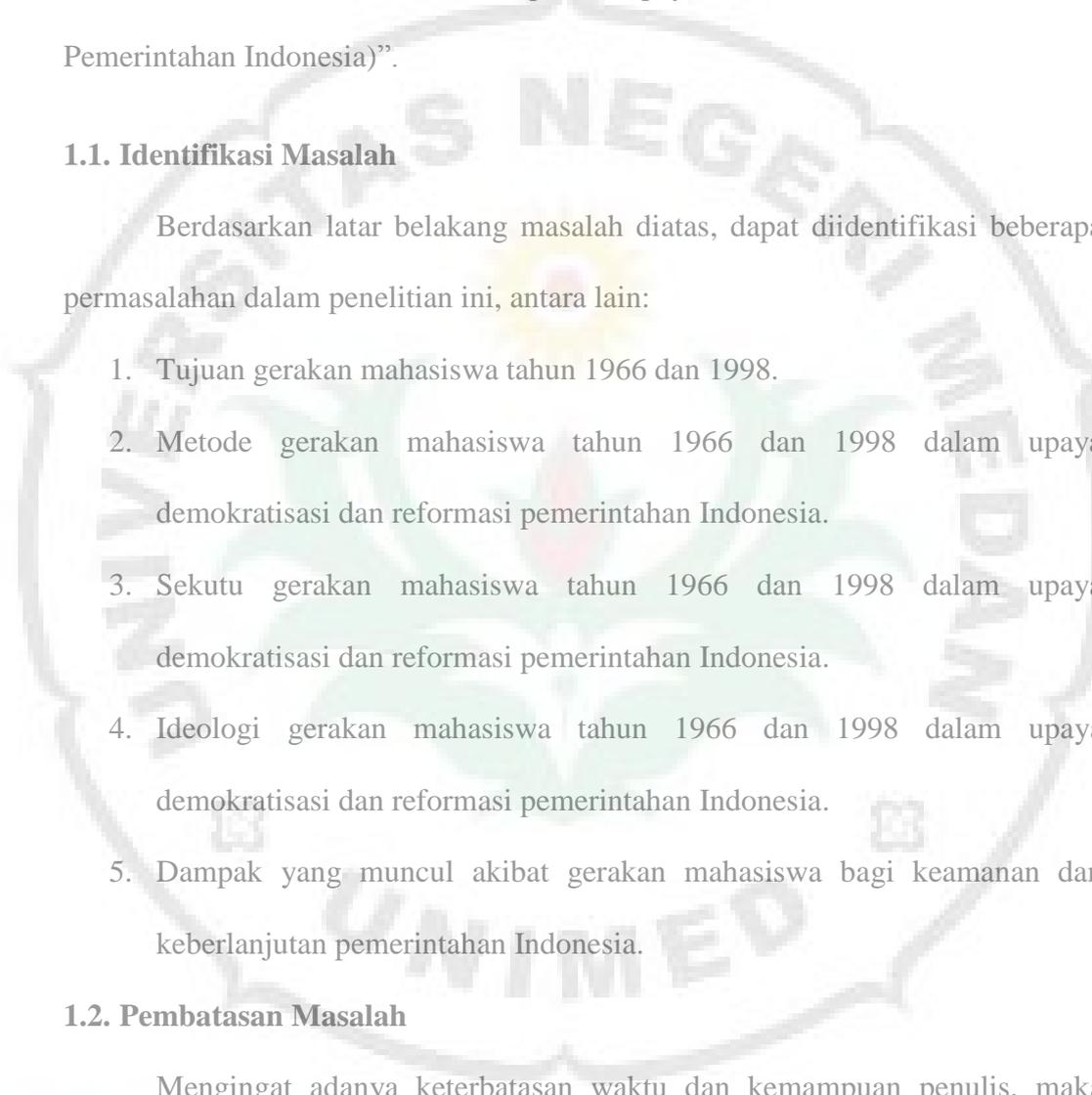
Keresahan masyarakat akan melegitnya harga-harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan ancaman putus kuliah serta masa depan yang suram dikalangan mayoritas mahasiswa, menjadi faktor penggerak tersendiri bagi kalangan kampus, mahasiswa dan sivitas akademika untuk menyatakan keprihatinanya. Aksi mimbar bebas dan keprihatinan di kampus menyerukan

tuntutan penurunan harga-harga terutama sembako, diikuti oleh tuntutan yang berkaitan dengan krisis ekonomi lainnya yakni agar penimbun barang ditindak, agar masalah pengangguran yang semakin luas ditangani, dan tuntutan kebijakan ekonomi lebih berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat.

Keadaan Indonesia yang semakin tidak terkendali mengakibatkan mahasiswa menyatakan sikap melalui gerakan mahasiswa tahun 1998. Gerakan ini dikenal dengan gerakan reformasi yang berarti mengembalikan Indonesia kepada keadaan dimana presiden menjalankan pemerintahan yang demokratis. Rakyat menuntut diadakannya reformasi total, selain dalam bidang ekonomi, juga terutama dalam bidang politik, dan hukum. Logikanya, krisis ekonomi Indonesia bukan hanya disebabkan oleh merosotnya nilai rupiah, tetapi juga oleh tatanan politik yang tidak demokratis, yang terlampaui diabdikan kepada kekuasaan yang otoriter, sehingga tidak mendatangkan keadilan yang sebenarnya. Ketika pemerintah dinilai tidak bakal mampu memulihkan ekonomi, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto pun menghilang. Oleh karena itu rakyat/mahasiswa tahun 1998 menuntut agar presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai prsiden Indonesia.

Melihat dari keberhasilan gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 mampu menjembatani terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

Penulis tertarik untuk melakukan studi komparasi tentang bagaimana gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 mampu melakukan upaya demokratisasi pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Dengan judul “Gerakan Mahasiswa

Tahun 1966 dan 1998 (Studi Komparasi Upaya Demokratisasi dan Reformasi Pemerintahan Indonesia)”.


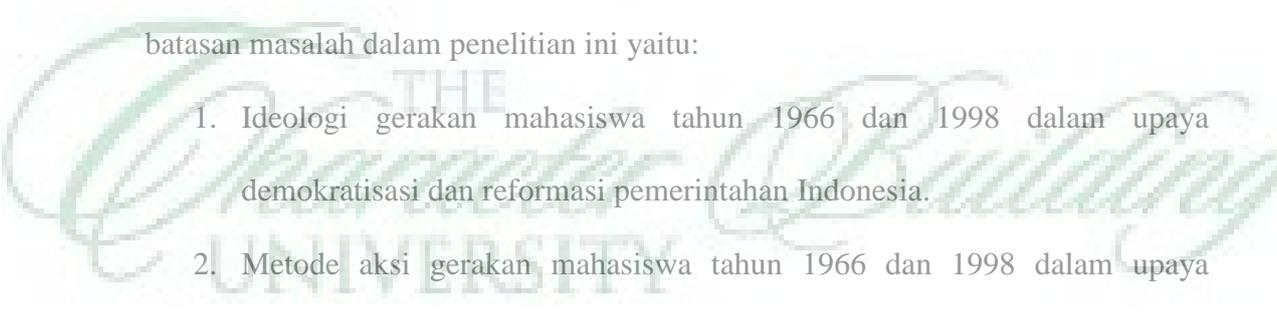
1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tujuan gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998.
2. Metode gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dalam upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia.
3. Sekutu gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dalam upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia.
4. Ideologi gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dalam upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia.
5. Dampak yang muncul akibat gerakan mahasiswa bagi keamanan dan keberlanjutan pemerintahan Indonesia.

1.2. Pembatasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Ideologi gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dalam upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia.
 2. Metode aksi gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dalam upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia.
 3. Dampak gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 bagi keamanan dan keberlanjutan pemerintahan Indonesia.
- 

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ideologi gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dalam upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia?
2. Metode aksi apa saja yang dipakai oleh gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dalam melancarkan gerakannya dalam upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia?
3. Bagaimana dampak dari gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 terhadap situasi keamanan dan keberlanjutan pemerintahan Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui ideologi gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dalam upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia.
2. Mengetahui metode aksi apa saja yang dipakai dalam gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dalam upaya demokratisasi dan reformasi pemerintahan Indonesia.
3. Mengetahui dampak gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 terhadap situasi keamanan dan keberlanjutan pemerintahan Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Setelah mencapai tujuan penelitian diatas, ada beberapa manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Pembaca dapat mengetahui, memahami bagaimana persamaan dan perbedaan gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998.

2. Sebuah gerakan termaksud gerakan mahasiswa pada dasarnya mudah dilupakan. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menyegarkan kembali ingatan penulis dan pembaca mengenai bagaimana gerakan mahasiswa tahun 1966 dengan 1998 menjembatani terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia.
3. Gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998 dapat dijadikan panutan bagi aktivis gerakan mahasiswa saat ini dengan catatan aktivis mahasiswa saat ini mampu memilah dan memilih apa yang seharusnya dicontoh dari gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998.

